



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.3-64 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu melakukan kompilasi harmonisasi dan sinkronisasi materi terhadap usulan rencana penyusunan produk hukum di Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 900);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024.
- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Prosundagri Tahun 2024, dengan jumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Prosundagri Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
a. 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah;
b. 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden; dan
c. 31 (tiga puluh satu) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Prosundagri Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Prosundagri Tahun 2024 diikuti dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Unit Kerja pemrakarsa dengan Direktorat/Pusat/Biro penanggungjawab menyampaikan jadwal pembahasan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

- KEENAM : Unit Kerja pemrakarsa dengan Direktorat/Pusat/Biro penanggungjawab menyampaikan laporan tiap triwulan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Prosundagri Tahun 2024 kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 100.4.3-64 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

I. SEKRETARIAT JENDERAL								
A. BIRO PERENCANAAN :								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penyeelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025		√	Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) PP 19 Tahun 2022	Tahunan	Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp. 0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemendagri	√		PP 10 Tahun 2023		Bagian Perencanaan Anggaran, Biro Perencanaan	B07

B. BIRO KEPEGAWAIAN :								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri.		√	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017	Luncuran Prosun 2023 Kebutuhan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017	Bagian Disiplin dan Penghargaan, Biro Kepegawaian	B11
C. BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA :								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri		√			Bagian Tatalaksana, Biro Organisasi dan Tata Laksana	B06
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Aparatur Sipil Negara		√			Bagian Tatalaksana, Biro Organisasi dan Tata Laksana	B06

		Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah						
3.	Rancangan Peraturan Menteri	Fasilitas Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	√				Bagian Layanan Administrasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana	B06
D. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI :								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	√			Luncuran Prosun 2023 Kebutuhan	Bagian Program dan Umum, Pusat Data dan Sistem Informasi	B10
E. BIRO HUKUM								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri	√			Kebutuhan Tahunan	Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum	B10
2.	Rancangan Peraturan Menteri	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di		√		Kebutuhan	Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum	B10

	Dalam Negeri	Lingkungan Kementerian Dalam Negeri						
F. BIRO KEUANGAN DAN ASET : -								
G. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN : -								
H. BIRO UMUM : -								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	√			Kebutuhan	Bagian Persuratan dan Kearsipan, Biro Umum	B04
I. PUSAT PENERANGAN : -								
J. PUSAT FASILITASI KERJA SAMA : -								
Keterangan RUU : - RPP : - RPerpres : - RPMDN : 10 (sepuluh)								

II. DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Asing		√	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013		Direktorat Ormas	B06
Keterangan RUU : - RPP : 1 (satu) RPerpres : - RPMDN : -								

III. DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Perizinan	√		Undang-Undang Nomor 5		Direktorat Dekosentrasi Tugas Pembantuan	B03

	Dalam Negeri				Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Permen PAN RB Nomor 22 Tahun 2022	Luncuran ijin prakarsa 2023	dan Kerja Sama (Subdit Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah dan Pelayanan Umum)	
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan	√		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Permen PAN RB Nomor 22 Tahun 2022	Luncuran ijin prakarsa 2023	Direktorat Dekosentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama (Subdit Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah dan Pelayanan Umum)	B03
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022	Luncuran ijin prakarsa 2023	Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara (Subdit Perkotaan dan Fasilitasi Masalah Peratahanan)	B06
<p>Keterangan</p> <p>RUU : -</p> <p>RPP : -</p> <p>RPerpres : -</p> <p>RPMDN : 3 (tiga)</p>								

IV. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Presiden	Pengembangan Kapasitas Daerah		√		Luncuran Prosundagri 2023	Direktorat EKPKD	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		√	Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020		Direktorat EKPKD	B11
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Tatacara Seleksi dan Panitia Pemilihan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Melalui Mekanisme Pengangkatan	√			Luncuran Prosundagri 2023	Direktorat PD Otsus & DPOD	B02
Keterangan RUU : - RPP : - RPerpres : 1 (satu) RPMDN : 2 (dua)								

V. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	√			Tahunan	PEIPD	BO7

Keterangan

RUU : -
RPP : -
RPerpres : -
RPMDN : 1 (satu)

VI. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

VII. DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rancangan Peraturan Menteri	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	√		Pasal 308 Undang-Undang	Tahunan	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	B06

	Dalam Negeri				Nomor 23 Tahun 2014			
2	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024	√		Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	Tahunan	Direktorat Pendapatan Daerah	B06
Keterangan RUU : - RPP : - RPerpres : - RPMDN : 2 (dua)								

VIII. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Presiden	Perubahan Kelima Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional		√		Luncuran Tahun 2023	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	B09
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak		√		Luncuran Tahun 2023	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	B09

3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Permendagri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi		√		Luncuran Tahun 2023	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	B09
4.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan		√		Luncuran Tahun 2023	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	B09
5.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pelaporan dan Pencatatan Kematian	√			Luncuran Tahun 2023	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	B09

Keterangan

RUU : -
RPP : -
RPerpres : 1 (satu)
RPMDN : 4 (empat)

IX. INSPEKTORAT JENDERAL

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	√		Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Tahunan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	B09

Keterangan RUU : - RPP : - RPerpres : - RPMDN : 1 (satu)								
X. BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		√	Pasal 283 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Luncuran 2023	Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	B10
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		√	Pasal 374 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Luncuran 2023	Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	B10
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		√	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016,	Luncuran 2023, Kebutuhan	Sekretariat Badan Litbang	B10

Keterangan
 RUU : -
 RPP : -
 RPerpres : -
 RPMDN : 3 (tiga)

XI. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja		√	Pasal 19 PP Nomor 16 Tahun 2018	Kebutuhan	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Data Kependudukan dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	√			Luncuran 2023	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	B11
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Perizinan	√			Luncuran 2023	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	B11
4.	Rancangan Peraturan Menteri	Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		√		Luncuran 2023, Mencabut dan	Pusat Pengembangan Kompetensi	B11

	Dalam Negeri					Mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018	Pemerintahan Dalam Negeri	
--	--------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

Keterangan

RUU : -
RPP : -
RPerpres : -
RPMDN : 4 (empat)

XII. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggung Jawab/Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	√			Kebutuhan, Luncuran 2023	Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan	B11

Keterangan

RUU : -
RPP : -
RPerpres : -
RPMDN : 1 (satu)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001